
**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Katryn Natania Mega¹, Lintje Kalangi², Peter M. Kapojos³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : katrynvania@gmail.com

ABSTRACT

The Village Financial System (SISKEUDES) is an application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Ministry of Home Affairs to help village governments improve the quality of village financial governance. In addition, with better use and control of the village financial system (SISKEUDES) application, village financial management will be more accountable. This study aims to determine whether the village financial system (SISKEUDES) has an effect on the village's financial management accountability. This type of research is called quantitative research. The source of research data used is primary data. The population in this study was all of the Finance Officers from 81 villages in the East Bolaang Mongondow Regency. The data analysis technique used is simple linear regression analysis. The data collection method used is the questionnaire method. The results of this research show that the village financial system (SISKEUDES) has a positive effect on the accountability of village financial management..

Keywords : *Village Financial Management Accountability, Village Financial System*

1. PENDAHULUAN

Terciptanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengatur pemerintahan desanya sendiri dan juga melakukan pembangunan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat mengelola pemerintahan yang didalamnya termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta sumber daya alam yang dimiliki. Dengan adanya undang-undang tersebut juga membuat status pembangunan atas desa berubah yang pada awalnya merupakan objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2018), dalam perwujudan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, masih terdapat banyak kasus mengenai penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oleh aparat desa terhadap anggaran desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat bagi pemerintah desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran desa, serta prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tidak disertai bersamaan dengan implementasi pengelolaan anggaran desa. Kurangnya sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa yang komprehensif juga merupakan salah satu penyebab masih terdapat banyak kasus mengenai penyelewengan atau korupsi anggaran desa. Masalah penyelewengan atau korupsi anggaran desa perlu diteliti karena hal-hal yang demikian perlu diwaspadai dan diantisipasi agar supaya anggaran desa tidak disalahgunakan lagi oleh para aparat desa, dan tidak merugikan serta menghambat proses pembangunan desa itu sendiri.

Pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan teknologi informasi dalam hal menciptakan transparansi dan akuntabilitas mengenai anggaran desa. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan

penggunaan teknologi informasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi SISKEUDES ini menjadi bentuk pengimplementasian teknologi informasi dalam bentuk aplikasi dengan konsep akuntabilitas untuk pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari diimplementasikannya aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berjalan selama 5 tahun. Selama menggunakan aplikasi ini ada beberapa kendala atau masalah yang dialami seperti masih kurangnya sumber daya manusia pada setiap desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, belum adanya kantor sebagai tempat untuk bekerja di 2 tahun pertama, masih sering berubahnya peraturan mengenai penggunaan anggaran desa sehingga membuat proses perubahan data pada aplikasi memakan waktu yang lama, serta ketersediaan jaringan internet yang masih belum merata di setiap desa dan sering terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pada saat menggunakan SISKEUDES, penyelewengan dalam pengelolaan keuangan mulai berkurang secara signifikan dibandingkan pada saat belum menggunakan aplikasi atau masih secara manual. Hal ini disebabkan karena untuk transaksi yang diinput dalam SISKEUDES harus dilampirkan dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban yang lengkap. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* ini menjelaskan bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemilik kekayaan dalam hal mengatur kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, teori *stewardship* ini juga menjelaskan bahwa para manajemen lebih berfokus pada tujuan bersama daripada tujuan individu.

Dalam penelitian ini teori *stewardship* berperan untuk menjelaskan keberadaan Pemerintah Desa (berperan sebagai *steward*) dan masyarakat yang bertindak sebagai pemilik dana (berperan sebagai *principal*). Dalam hal ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat menunjukkan keterkaitan antara pemerintah desa dan masyarakat, yaitu pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan secara terbuka dan jujur segala informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang mudah didapatkan oleh masyarakat.

2.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang menaati atau mematuhi peraturan yang berlaku. Sulistyono (2010) dalam Luminkewas, dkk (2021) menyatakan bahwa teori kepatuhan ini dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk lebih patuh terhadap peraturan yang ada, seperti halnya dengan perusahaan atau lembaga pemerintah yang ingin mengungkapkan laporan keuangannya secara tepat waktu karena selain merupakan kewajiban dari perusahaan atau lembaga pemerintah dalam mengungkapkan laporan keuangan secara tepat waktu, juga akan sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan.

2.3 Akuntansi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses

identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan dan kejadian keuangan, penyajian laporan dan penginterpretasian atas hasilnya.

2.4 Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Hasanah dan Fauzi (2017:1) yaitu suatu aktivitas pemberian jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah yang berdasarkan pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Akuntansi pemerintahan secara khusus mempunyai tujuan yaitu akuntabilitas, manajerial dan pengawasan (Hasanah dan Fauzi, 2017:2).

2.5 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa merupakan informasi pengawasan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pengawasan keuangan desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan suatu aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Aplikasi SISKEUDES ini dirancang sederhana agar mudah untuk digunakan serta dilengkapi dengan fitur-fitur sesuai kebutuhan. Proses penginputan sekali yang sesuai dengan catatan transaksi yang ada lebih mudah dilakukan karena adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga menghasilkan output yang diperlukan seperti laporan realisasi, APBDesa, serta laporan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga aplikasi SISKEUDES ini juga memudahkan pemerintah desa untuk melaporkan keuangan desa. Pelaporan yang sistematis serta terkomputerisasi dapat mengurangi aktivitas penyelewengan sehingga akan lebih akuntabel. Selain itu, dengan penggunaan dan pengendalian yang lebih baik dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel.

2.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang akuntabilitas yaitu asas yang menetapkan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Subroto (2009:27) dalam Kasenda (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban agar kinerja dan tindakan seorang pimpinan dan pengguna dapat dijelaskan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mencapai akuntabilitas.

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ialah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan anggaran desa seperti yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

-
- b. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran desa dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - c. Penatausahaan
Kaur Keuangan melaksanakan tugas penatausahaan keuangan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi perbendaharaan. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menuliskan semua pendapatan dan pengeluaran pada buku kas umum.
 - d. Pelaporan
Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan yang disampaikan meliputi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
 - e. Pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dengan perantaraan Camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses pengelolaan keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan benar oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diciptakan berdasarkan konsep akuntabilitas agar dapat mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Teori Stewardship, dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat menunjukkan keterkaitan antara pemerintah desa dan masyarakat, yaitu pemerintah desa wajib mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat semua informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Selain itu, teori kepatuhan juga dapat memotivasi seseorang agar lebih patuh terhadap peraturan yang ada, begitu juga perusahaan atau lembaga pemerintahan yang ingin berusaha untuk mengungkapkan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Penelitian Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Neni Nurhayati, dkk (2021) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Dewi dan Julianto (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

H : Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Mufti Arief Arfiansyah (2020) yang berjudul Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan hasil penelitiannya yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan juga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Putu Ayu Desy Ratna Dewi dan I Putu Julianto (2020) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Dengan hasil penelitiannya yaitu penerapan sistem informasi

keuangan dan juga pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian dari Nurhayati, dkk (2021) yang berjudul Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hasil penelitiannya yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), pengawasan BPD, partisipasi masyarakat serta sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa; partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap sistem keuangan desa; dan sistem keuangan desa juga dapat memediasi pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM), pengawasan BPD serta partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan jenis data kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dimana dalam hal ini yaitu pemerintah desa pada kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh Kaur Keuangan dari 81 desa yang terdapat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik sampling sensus atau teknik sampling total. Teknik sampling total ini merupakan teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2020:134).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Kaur Keuangan sebagai perwakilan dari tiap-tiap desa yang berada pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk menilai jawaban dari responden, penelitian ini menggunakan skala likert, dengan kriteria penilaian yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Ragu-Ragu; 4 = Setuju; dan 5 = Sangat Setuju.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana. Selain itu juga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dengan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 22 melalui beberapa pengujian, diantaranya yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji statistik t dan koefisien determinasi (R^2). Analisis statistik deskriptif dipakai untuk menganalisis suatu data dengan cara menjelaskan data yang telah dikumpulkan apa adanya dengan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, uji kualitas data, terbagi dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, dimana uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2020:175). Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah suatu hasil dari penelitian dapat dikatakan reliabel atau tidak. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2020:48). Selanjutnya, uji asumsi klasik, terbagi menjadi dua yaitu uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki kontribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini, digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan uji grafik Normal P-P Plot of *Regression Standardized Residual* untuk melakukan uji normalitas. Sedangkan untuk uji heterokedastisitas dipakai untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat variance yang tidak sama antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam melakukan uji heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glesjer untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2020). Berikutnya, uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak. Terakhir, koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari varians variabel

yaitu dengan cara menghitung besarnya nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi didapatkan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi kemudian dikalikan dengan 100% (Sugiyono, 2020:214).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek dan Responden Penelitian

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah salah satu daerah kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini mengambil sampel populasi semua desa yang ada pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebanyak 81 desa. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022. Data untuk jumlah kuesioner yang telah terisi dan dikembalikan yaitu sebanyak 81 kuesioner (100%) dan jumlah kuesioner yang tidak terisi dan tidak dikembalikan adalah sebanyak 0 kuesioner (0%). Dengan demikian, terdapat sebanyak 81 kuesioner yang dapat diolah datanya.

Tabel 1. Data Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis kelamin		
	Laki-laki	34	41,98
	Perempuan	47	58,02
	Jumlah	81	100,00
2.	Tingkat pendidikan		
	SMA/SMK/Sederajat	78	96,30
	S1	3	3,70
	Jumlah	81	100,00
3.	Jabatan		
	Kaur Keuangan	81	100,00
	Jumlah	81	100,00

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat 34 responden laki-laki (41,98%) dan 47 responden perempuan (58,02%). Berdasarkan jabatannya, responden Kaur Keuangan berjumlah 81 orang (100%). Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari lulusan SMA/SMK/Sederajat sebanyak 78 responden (96,30%), dan Sarjana (S1) sebanyak 3 responden (3,70%).

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Indikator	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kriteria
X02	81	4	5	4.23	0.426	Sangat baik
X03	81	4	5	4.74	0.441	Sangat baik
X04	81	4	5	4.26	0.441	Sangat baik
X06	81	4	5	4.37	0.486	Sangat baik
X07	81	4	5	4.41	0.494	Sangat baik
X08	81	4	5	4.49	0.503	Sangat baik

X10	81	4	5	4.72	0.454	Sangat baik
X14	81	4	5	4.75	0.434	Sangat baik
X15	81	4	5	4.86	0.345	Sangat baik
Total Mean				4,53		Sangat baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, diperoleh total *mean* (rata-rata) dari variabel sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah sebesar 4,53 dimana nilai rata-rata 4,53 diketahui termasuk dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow beroperasi sangat baik.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kriteria
Y01	81	4	5	4.65	0.479	Sangat baik
Y02	81	4	5	4.26	0.441	Sangat baik
Y03	81	4	5	4.90	0.300	Sangat baik
Y05	81	4	5	4.90	0.300	Sangat baik
Y06	81	4	5	4.99	0.111	Sangat baik
Y08	81	4	5	4.23	0.426	Sangat baik
Y09	81	4	5	4.90	0.300	Sangat baik
Y10	81	4	5	4.99	0.111	Sangat baik
Y11	81	4	5	4.32	0.470	Sangat baik
Total Mean				4,68		Sangat baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 diatas, diperoleh total *mean* (total nilai rata-rata) dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 4,68 dimana nilai rata-rata 4,68 termasuk kategori sangat baik. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow beroperasi sangat baik.

4.1.3. Uji Kualitas Data

4.1.3.1 Uji Validitas

Sistem keuangan desa (variabel X) diuji dengan 15 butir pernyataan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (variabel Y) diuji dengan 11 butir pernyataan untuk uji validitas instrumen penelitian. Namun pada saat dilakukan uji validitas instrumen, ditemukan beberapa butir pernyataan yang tidak memenuhi syarat validitas instrumen, sehingga peneliti memodifikasi data penelitian dengan menghilangkan beberapa pernyataan yang mempunyai nilai r-hitung lebih rendah dari nilai r-tabel untuk membuat seluruh kumpulan data valid. Setelah dilakukan pengolahan data kedua, diperoleh nilai untuk *Corrected Item Total Correlation* pada setiap item pernyataan dari variabel X dan Y menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari nilai r-tabel yang sebesar 0,221 dengan N = 81 dan tingkat signifikan 5% (0,05). Dikarenakan nilai *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari nilai r-tabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan pada setiap variabel dapat dikatakan valid.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	0,841	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,708	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan pada hasil dari pengolahan data yang ditunjukkan pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, didapatkan kesimpulan bahwa masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

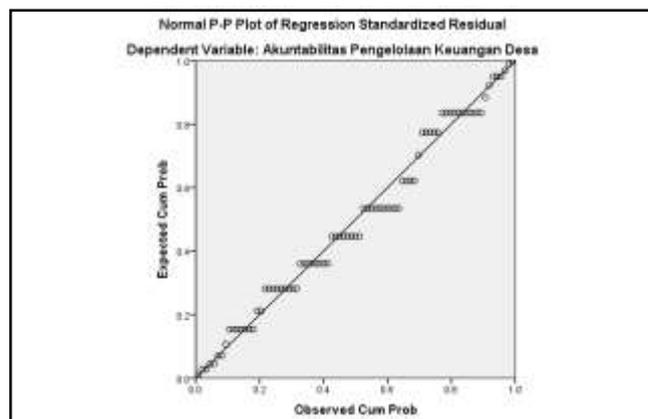
4.1.4. Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49320488
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.963
Asymp. Sig. (2-tailed)		.312

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022



Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS, 2022

Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan pada hasil pengujian normalitas seperti dalam Tabel 5 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,312 yang berarti nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dari Gambar 1 dapat diketahui pula bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi dengan normal.

4.1.4.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.303	1.546		-.843	.402
Sistem Keuangan Desa	.061	.038	.178	1.605	.113

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Apabila nilai signifikansi menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari residual lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.1.5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.562	2.560		11.155	.000
Sistem Keuangan Desa	.333	.063	.513	5.318	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Dari hasil pengujian regresi linier sederhana di atas, diperoleh persamaan regresi pada penelitian ini yang disusun sebagai berikut :

$$Y = 28.562 + 0,333X$$

4.1.6. Uji Statistik t

Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.562	2.560		11.155	.000
Sistem Keuangan Desa	.333	.063	.513	5.318	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi dari pengaruh

sistem keuangan desa (SISKEUDES) (X) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t_{hitung} sebesar 5,318 lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} 5,318 > t_{tabel} 1,99045$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.1.7. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513	.264	.254	1.503

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Dari hasil pengujian yang terdapat pada Tabel 9 diperoleh nilai R sebesar 0,513. Sedangkan nilai untuk *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,254 yang berarti bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh yang signifikan atau bisa dijelaskan oleh variabel bebas, dalam hal ini sistem keuangan desa, yaitu sebesar 25,4%. Sedangkan untuk hasil sisanya sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang sudah dilakukan seperti pada Tabel 8 diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 5,318 > t_{tabel} 1,99045$), jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya, dengan adanya penggunaan atau penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) maka dapat menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, semakin baik aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) digunakan maka akan semakin akuntabel pula pengelolaan keuangan desa.

Hasil dari penelitian ini sesuai juga dengan teori stewardship yang mengatakan bahwa pemerintah desa lebih berfokus pada tujuan bersama dibandingkan tujuan pribadi. Berdasarkan teori ini pemerintah desa melakukan penyusunan anggaran desa sampai dengan pelaporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas penyimpangan atau kecurangan terhadap anggaran desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang akan memberikan pengaruh yang baik pula untuk masyarakat.

Selain itu juga, hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori kepatuhan, dimana dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini dapat memudahkan pemerintah desa dalam menyusun anggaran desa sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Penyusunan anggaran sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat membuat pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel.

Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Arfiansyah (2020) yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Dewi dan Julianto (2020) yang membuktikan bahwa sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) mempunyai peran dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, semakin baik penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) maka pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka saran dari penulis semoga dapat bermanfaat bagi pembaca yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diharapkan agar dapat memberikan bimbingan teknis ataupun pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga tercipta pengelolaan keuangan desa yang semakin akuntabel.
2. Kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kiranya dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai laporan keuangan desa, dana desa, serta hasil kerjanya terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat untuk lebih mudah dalam mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini, selain itu juga penggunaan bahasa dalam pernyataan kuesioner harus yang mudah untuk dipahami agar tidak menimbulkan banyak penafsiran, serta diharapkan juga untuk dapat mengembangkan penelitian berikutnya dengan menggunakan metode dan alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M.A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67-82.
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa/article/view/2369>
- Atikah, A. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Situbondo). Skripsi. Universitas Jember. Jember.
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/98238/Afifatul%20Atikah-160810301057.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Sistem Keuangan Desa: Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0. Jakarta.
[http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes\(4\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes(4).pdf) (diakses pada tanggal 14 Januari 2022).
- Dewi, Putu Ayu Ratna., & I Putu Julianto. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281-292.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296>
- Ghozali. (2020). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi Delapan. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-

-
- Hasanah, N, dan A. Fauzi. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Edisi Pertama. Bogor : In Media. Indonesia Corruption Watch. 2018. *Outlook Dana Desa 2018*. Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/outlook_desa_2018_-_icw.pdf (diakses pada tanggal 11 Juli 2022).
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 102-110. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20907/20594>
- Khalifa, M. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/55870/>
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. LAN. Jakarta. <http://puskan.lan.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf> (diakses pada tanggal 14 Februari 2022).
- Lumingkewas, G.S., Kalangi, L., & Gerungai, N.Y.T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA*, 9(1), 163-172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32006>
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 7(2), 215-234. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/4072>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rohman, A., Ferina, I.S., & Ermadiani. (2018). Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.